

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Provinsi Sulawesi Barat adalah pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 pada tanggal 5 Oktober 2004, sebagai provinsi yang ke-33 di Indonesia yang terdiri dari 5 (lima) kabupaten, dengan ibukota Mamuju, terakhir di tahun 2013 Kabupaten Mamuju dimekarkan lagi satu daerah otonomi baru Kabupaten Mamuju Tengah, sehingga Provinsi Sulawesi Barat dengan terbentuknya daerah otonomi baru ini menjadi 6 kabupaten. Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat merupakan wujud kristalisasi keinginan masyarakat di wilayah Mandar sejak lama. Sebagai sebuah daerah yang baru, dengan ketertinggalan pembangunan dari daerah lainnya, membuat provinsi yang baru ini berada dalam kondisi serba terbatas, baik dari segi sumber daya, sarana, prasarana maupun infrastruktur.

Untuk itu, agar dapat segera keluar dari predikat daerah tertinggal sekaligus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka Provinsi Sulawesi Barat memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur, utamanya pada sektor prasarana dan infrastruktur wilayah. Pengutamaan pelaksanaan pembangunan pada beberapa sektor prioritas tersebut tentu saja perlu dibarengi dan diimbangi dengan pembangunan pada sektor lainnya.

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memegang peran sentral dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat dengan mempertimbangkan kondisi perubahan yang terjadi dalam organisasi yang harus dikelola dengan baik dan optimal, olehnya itu diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi dan perubahan internal dan eksternal sebagai dasar untuk bertindak.

Berkaitan hal tersebut diatas, penyusunan laporan dalam bentuk Sistem



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi. Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Evaluasi program dan kegiatan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan sebagai wujud akuntabilitas terhadap pelaksanaan peran, tugas dan fungsi. Untuk memperoleh data dan bahan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan pada tahun berkenaan, perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018, yang didasari tugas pokok dan fungsi.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2013 tanggal 24 September 2013 diuraikan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Adapun uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok:

- a. Melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan yang dilimpahkan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;

- b. Penyusunan program dan perencanaan di bidang Perhubungan dan Komunikasi berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
- c. Pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian di bidang Perhubungan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pembinaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

2. Susunan Organisasi

Adapun susunan organisasi pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat Dinas terdiri dari:
 - o Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - o Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari:
 - o Seksi Lalu Lintas Jalan;
 - o Seksi Angkutan;
 - o Seksi Terminal.
- d. Bidang Pelayaran terdiri dari:
 - o Seksi Kepelabuhanan;
 - o Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran;
 - o Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP.
- e. Bidang Pengembangan Transportasi Kebandarudaraan dan Perkeretaapain terdiri dari:
 - o Seksi Perkeretaapain;
 - o Seksi Kebandarudaraan dan Lingkungan Perhubungan;
 - o Seksi Pengembangan Sistem dan Multimoda.

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat juga mempunyai 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu:

- UPTD LLAJ Wilayah I Mamasa- Polewali Mandar
- UPTD LLAJ Wilayah II Mamuju- Majene
- UPTD LLAJ Wilayah III Mamuju Tengah- Mamuju Utara

Jenjang struktur yang tersedia pada lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat antara lain :

- Kepala Dinas 1 (satu) orang setingkat eselon II/a
- Sekretaris 1 (satu) orang dan Kepala Bidang sebanyak 3 (tiga) orang dengan jabatan setingkat eselon III/a
- Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan jabatan setingkat eselon IV/a

Adapun jenjang struktur pada ketiga UPTD, masing – masing terdiri dari :

- Kepala UPTD 3 (tiga) orang setingkat eselon III/a

C. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIS

Berbagai perubahan dan perkembangan berlangsung sangat cepat yang merupakan faktor strategis yang menentukan peran dan fungsi yang mempengaruhi dinamika perkembangan Perhubungan di Sulawesi Barat, sehingga perlu respon produktif dan antisipatif untuk melakukan penyesuaian dengan berbagai macam perubahan peraturan. Dalam hal ini kebijakan otonomi daerah, kondisi ekonomi, sosial dan politik juga memaksa Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat untuk lebih proaktif menyikapi keberhasilan pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan bidang Perhubungan dan Layanan Komunikasi seperti Perda tentang Perhubungan dan kebijakan yang mendukung *Strong Point* Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

1. Sumber Daya Aparatur

Pada tahun 2019, jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 56 orang Pegawai Negeri Sipil dan 15 orang Pegawai Tidak Tetap.

Tabel 1. Jumlah ASN pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Eselon, Tahun 2019

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	7
3.	ESELON IV	21
4.	NON ESELON	28
TOTAL		57

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Dishub Sulbar

Dari 57 (lima puluh tujuh) jumlah ASN tersebut di atas, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang adalah pejabat struktural, terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 3 (tiga) orang kepala UPTD dan 21 (dua puluh satu) orang Kepala Sub Bagian/Seksi.

Tabel 2. Jumlah ASN pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Golongan, Tahun 2019

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	GOLONGAN IV	13
2.	GOLONGAN III	38
3.	GOLONGAN II	14
4.	GOLONGAN I	-
TOTAL		57

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Dishub Sulbar

Tabel 3. Jumlah ASN pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Tk. Pendidikan, Tahun 2019

NO	PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN	JUMLAH
1.	STRATA 3	-
2.	STRATA 2	12
3.	STRATA 1	33
4.	DIPLOMA 3	3
5.	DIPLOMA 2	1
6.	DIPLOMA 1	-
7.	SLTA	10
8.	SLTP	-
TOTAL		65

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Dishub Sulbar

Tabel 4. Jumlah PTT dan Sukarela pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan Pendidikan, Tahun 2019

NO	PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN	JUMLAH
1.	STRATA 2	-
2.	STRATA 1	7
3.	DIPLOMA 3	2
4.	SLTA	21
TOTAL		30

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Dishub Sulbar

Dengan menggunakan tolok ukur pendidikan formal serta mempertimbangkan tuntutan kompetensi dalam menangani bidang tugasnya, kualitas SDM masih sangat diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan. Tantangan peran organisasi kedepan untuk menunjang visi dan misi organisasi semakin kompleks permasalahannya, selain itu faktor lain yang sangat berpengaruh adalah etos kerja dan kedisiplinan yang masih perlu ditingkatkan.

2. Sarana dan Prasarana

➤ Sarana dan Prasarana Perkantoran

Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2019 tercatat sebagai berikut:

1. Kendaraan Dinas sebanyak 37 unit, terdiri atas kendaraan roda empat sebanyak 8 (delapan) unit, dan kendaraan roda dua sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit;
2. Gedung Kantor dengan keterbatasan ruangan, kenyamanan dalam bekerja tetap diupayakan. Gedung kantor dilengkapi dengan *Air Condition (AC) Split* sebanyak 15 (lima belas) unit, *standing AC* sebanyak 3 (tiga) unit, meja kantor sebanyak 36 unit, kursi kantor sebanyak 86 unit, lemari kantor sebanyak 15 unit, *filling cabinet* sebanyak 16 unit, kipas angin sebanyak 6 unit, kulkas 2 (dua) unit, televisi 3 (tiga) unit, serta peralatan lainnya yang mendukung kegiatan tugas kantor seperti peralatan *cleaning service* dan lain-lain;
3. *Notebook* sebanyak 10 (sepuluh) unit, komputer PC 29 (dua puluh sembilan) unit, printer sebanyak 20 (dua puluh) unit ;

4. Mesin tik sebanyak 4 (empat) unit;
5. Telepon sebanyak 1 (satu) unit yang juga berfungsi sebagai mesin *faximile*.

Selanjutnya pengadaan peralatan kantor untuk tahun anggaran 2019 terdiri dari printer kecil 3 unit, Laptop 2 unit dan PC 3 unit.

3. Lingkungan Strategis

Kemajuan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak roda organisasi merupakan faktor internal yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategis organisasi, khususnya di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih kurangnya tenaga ASN di lapangan sehingga Diklat – diklat dasar sangatlah dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan SDM bidang Perhubungan.

Lingkungan Internal

Faktor internal yang berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi organisasi, diantaranya adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan dan kelembagaan organisasi.

Melalui pencermatan terhadap lingkungan internal menghasilkan penemukenalan atas sejumlah potensi kekuatan (*potential internal strengths*) dan potensi kelemahan (*potential internal weaknesses*). Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan dan kelemahan internal yang sangat mempengaruhi keberhasilan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat dalam mencapai Visi dan Misi yang telah disepakati.

Analisa Kondisi Lingkungan Internal:

Kekuatan (*Strength*):

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 147 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Administrasi dan Lembaga Teknis Operasional Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

3. Peraturan Daerah / aturan-aturan intern lainnya.

Kelemahan (Weakness):

1. Struktur organisasi yang belum dapat mengoptimalkan mekanisme kerja;
2. Kualitas ASN yang masih terbatas terutama SDM Bidang Perhubungan;
3. Sarana dan fasilitas kerja yang belum memadai;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang Perhubungan dan Layanan Komunikasi;
5. Aparatur masih lemah dalam penjabaran program – program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan

Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan cerminan peluang, tantangan atau ancaman yang dihadapi oleh Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Analisa Kondisi Lingkungan Eksternal :

Peluang (Opportunities):

1. Dukungan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang besar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur Perhubungan dan Layanan Komunikasi;
2. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan lembaga terkait dan SKPD lain;
3. Banyaknya tawaran pengembangan SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
4. Perkembangan Fasilitas Perhubungan khususnya terminal angkutan darat, pelabuhan laut dan bandar udara di Sulawesi Barat meningkat;
5. Kebijakan percepatan pembangunan sektor Infrastruktur Perhubungan di Sulawesi Barat.

Tantangan (Threats):

1. Sebagai sebuah daerah baru dengan ketertinggalan pembangunan dari daerah

- lainnya, membuat provinsi Sulawesi Barat berada dalam kondisi serba terbatas, baik dari segi sumber daya, sarana dan prasarana maupun infrastruktur;
2. Siklus/ keadaan iklim yang tidak menentu sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan prasarana dan infrastruktur;
 3. Tingginya harapan masyarakat terhadap percepatan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.
 4. Lahirnya paradigma baru yang dicapai melalui satu tahapan proses dalam dimensi waktu, yaitu terjadinya saling keterkaitan (interaksi), saling keterpaduan (interrelasi), dan saling membutuhkan (interdependensi) antar pranata (institusi dan regulasi) dari semua bidang kehidupan yang harus diantisipasi oleh Sistem Transportasi Nasional (Sistranas).
 5. Terjadinya konvergensi sistem teknologi yang melahirkan varian-varian baru teknologi interaktif dan saling bersinergi yang tujuannya diarahkan untuk meningkatkan mutu dan nilai tambah produksi nasional, baik untuk memenuhi kebutuhan berswasembada maupun untuk keperluan memperbesar peluang meningkatkan ekspor, yang merupakan tantangan bagi pengembangan teknologi transportasi. Disamping itu dengan semakin langkanya energi fosil menuntut ditemukannya energi baru yang lebih sustainable sehingga memerlukan penyesuaian dalam teknologi transportasi.
 6. Kecenderungan terpolanya lingkungan kerja masa depan yang sekaligus menggambarkan interaksi antar kegiatan dengan layanan antar moda transportasi yang saling terintegrasi secara kesisteman dalam bentuk transportasi multi moda.
 7. Lingkungan kerja masa depan yang terbentuk akibat peran sentral teknologi transportasi, telah melahirkan realitas baru, yaitu nuansa keterhubungan global dengan mobilitas global antar sub sistem kegiatan.
 8. Di dalam persaingan ekonomi global yang makin tajam dan diwarnai dengan kecanggihan teknologi transportasi sebagai wahana bagi

terselenggaranya keterhubungan dan mobilitas global di pelbagai bidang kehidupan, akan dihadapkan kepada tuntutan yang semakin besar atas kecepatan, keandalan, efisiensi dan daya saing yang tinggi. Di dalam dunia yang semakin menyatu, jaringan fisik dan pelayanan transportasi nasional merupakan subsistem dari jaringan pelayanan regional dan global. Dengan demikian, pembangunan di sub sektor transportasi, harus memperlihatkan kompatibilitas jaringan nasional dengan jaringan global dalam suatu rangkaian keseimbangan pergerakan dengan kegiatan ekonomi yang andal dan efisien.

9. Dengan semakin berkurangnya sumber dana dari pemerintah (APBN), tantangan ke depan yang dihadapi adalah memanfaatkan dana-dana masyarakat dan membuka peluang kerjasama dengan badan usaha dalam penyelenggaraan dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Hal ini menuntut dilakukannya pelbagai penyempurnaan regulasi terutama yang berkaitan dengan struktur industri penyediaan sarana dan pra sarana transportasi. Kerjasama dengan badan usaha ditujukan untuk menyediakan infrastruktur transportasi guna memberikan pelayanan terhadap distribusi komoditi perdagangan dan industri, serta pergerakan penumpang baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
10. Sektor transportasi dituntut untuk semakin mampu berperan dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang, barang, dan jasa-jasa, membuka aksesibilitas ke daerah terpencil, daerah rawan bencana dan daerah perbatasan, juga harus berfungsi sebagai perekat dan jembatan guna mendukung tumbuhnya perekonomian nasional dan wilayah, serta sekaligus mempersempit kesenjangan pembangunan antar daerah. Transportasi makin dituntut untuk memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi wilayah, dalam kesesuaiannya dengan tata ruang, dan kelestarian lingkungan.
11. Pelaksanaan secara konsekuen pemerintahan yang baik (*good governance*)

dalam penyelenggaraan tugas umum di bidang pemerintahan dan pembangunan perhubungan, yang berorientasi pada: pertama, pencapaian tujuan nasional yang mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemennya, seperti: legitimasi, akuntabilitas, hak asasi manusia, otonomi dan pembagian kewenangan serta terjaminnya hak pengawasan masyarakat. Kedua, pelaksanaan tugas dilakukan oleh aparatur negara secara efektif dan efisien sebagai upaya mencapai tujuan nasional. Kesemuanya ini merupakan tantangan bagi Departemen Perhubungan dalam rangka membentuk SDM yang memiliki kompetensi memadai dalam menyelenggarakan dan membangun sarana dan prasarana transportasi secara efektif dan efisien.

12. Peran SDM Dinas Perhubungan pada abad 21 sangat strategis, mengingat bahwa peran SDM dalam rangka menghadapi era globalisasi dan desentralisasi perlu dipersiapkan SDM yang berkualitas agar mampu menjawab tantangan transportasi masa kini dan masa yang akan datang. Tantangan dan tuntutan terhadap Perhubungan tidaklah mudah dan sederhana. Permasalahan dan kenyataan yang dihadapi oleh masing-masing sub sektor perhubungan sangat kompleks dan dinamis, oleh karenanya perlu suatu perhatian dan pemikiran yang serius dengan komitmen yang kuat dalam menyiapkan dan meningkatkan kemampuan SDM terkait. Pemenuhan dan Peningkatan mutu SDM adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi. Dengan demikian, maka Dinas Perhubungan perlu mempersiapkan program pendidikan dan pelatihan serta kaderisasi sejak dini agar diperoleh SDM yang kompeten, professional dalam bidang perhubungan. Proses penyiapan, pembentukan dan peningkatan SDM perlu senantiasa dilakukan dengan cara yang terencana, terarah, efektif, efisien dan optimal, serta berkelanjutan.
13. Perkembangan aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam segala bidang serta diiringi oleh kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi telah dan akan senantiasa memberikan dorongan pengaruh dalam paradigma perhubungan yang sesuai. Pada Perubahan paradigma sektor perhubungan, akan senantiasa diikuti dengan tuntutan terhadap peningkatan dan penyempurnaan diklat SDM Kementerian Perhubungan. Terlaksananya Desentralisasi dalam arti memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam pembangunan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa perencanaan strategis makro masih tetap menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat termasuk sektor prasarana. Departemen Perhubungan bertanggung jawab terhadap perencanaan strategis sektor transportasi untuk mencapai efisiensi nasional, menetapkan standar keselamatan, sertifikasi kelaikan operasi prasarana dan sarana, pengembangan sumber daya manusia serta optimasi pembiayaan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha mencapai tujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi. Dalam Rencana Strategis, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategis meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran dengan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang berorientasi pada cita-cita masa depan yang lebih baik.

Dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat, maka tantangan kedepan semakin besar. Selain sumber daya alam dan sumber daya manusia, diperlukan suatu rencana yang matang dan terukur guna pencapaian tujuan pemerintahan provinsi. Era globalisasi menuntut provinsi untuk membentuk jaringan informasi dan telekomunikasi agar tidak tertinggal dan tersisih dari suatu kemajuan teknologi.

Pemerintah Provinsi harus memandang dirinya sebagai suatu perusahaan yang harus dapat mensejahterakan karyawannya yang dalam hal ini adalah masyarakat, dan sumber daya sebagai produk yang dapat dijual kepada provinsi tetangga.

Mencermati kondisi tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat sebagai unsur pelaksana dan penunjang Pemerintah Daerah telah merumuskan serangkaian kegiatan kebijakan pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang dituangkan dalam visi, misi dan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat.

2.1.1. VISI DAN MISI SKPD

Visi Dinas Perhubungan tahun 2017 -2022 adalah ***“Terwujudnya pelayanan transportasi, komunikasi dan informatika yang aman, efektif, efisien dan merata.”***

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan dan kapasitas sumber daya transportasi, komunikasi dan informatika yang berkualitas;
2. Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian transportasi yang terpadu serta ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemerataan pembangunan dan kelancaran ekonomi;
3. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi yang efektif dan efisien dalam rangka kerjasama dan kemitraan antar satuan kerja perangkat daerah serta mendorong peranan media massa meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab untuk memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.

2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Pembangunan Transportasi pada Rencana Strategis Tahun 2017- 2022 di Provinsi Sulawesi Barat, bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang aman, efektif dan efisien guna mendukung perwujudan masyarakat yang lebih sejahtera. Tujuan tersebut terjabarkan dalam 5 bidang, yaitu :

1. Mewujudkan administrasi, manajemen serta penyediaan sarana dan prasarana perkatoran yang efektif dan efisien.
2. Mewujudkan peningkatan kapasitas SDM yang profesional sehingga menghasilkan kinerja maksimal berdampak secara internal maupun eksternal yang terbentuk dengan interaksi dengan pihak lain.
3. Meningkatkan peran serta transportasi (darat, laut dan udara) dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.

Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta

keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang berdampak kepada peningkatan daya guna dan minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat.

Sasaran pembangunan transportasi Sulawesi Barat jangka menengah tahun 2017-2022 adalah:

1. Ketepatan fungsi dalam pelayanan administrasi dalam menunjang tugas organisasi yang efektif, efisien dan terukur.
2. Kecukupan sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur berdasarkan prinsip cepat, pasti, mudah dan adil.
4. Terbentuknya karakter SDM Aparatur Perhubungan yang berintegritas, netral, *capable*, profesional dan berkinerja tinggi.
5. Meningkatnya akuntabilitas nilai Dinas Perhubungan melalui tersedianya dokumen perencanaan, pemograman, dokumen analisis dan evaluasi dalam penyelenggaraan kegiatan.
6. Meningkatnya pelayanan, keselamatan dan keamanan transportasi.
7. Terbangunnya sarana dan prasarana penunjang transportasi yang dapat memberikan dukungan bagi perekonomian daerah yang berkelanjutan (*Sustainable Growth*).

Setiap sasaran dapat diukur melalui indikator sebagai berikut :

- Sasaran pertama, dapat diukur melalui indikator : Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi perkantoran.
- Sasaran kedua, dapat diukur melalui indikator : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur.
- Sasaran ketiga, dapat diukur melalui indikator : Persentase Kesesuaian pekerjaan yang dibebankan kepada aparatur dengan kemampuan dan kompetensinya.

- Sasaran keempat, dapat diukur melalui indikator :
 - a. Jumlah SDM operator prasarana dan sarana transportasi yang telah memiliki sertifikat;
 - b. Jumlah SDM fungsional teknis Dinas Perhubungan;
 - c. Persentase pegawai peserta diklat yang dimanfaatkan sesuai dengan hasil diklat.
- Sasaran kelima, dapat diukur melalui indikator :
 - a. Jumlah dokumen perencanaan program, anggaran, dan laporan Dinas Perhubungan yang terselesaikan tepat waktu;
 - b. Nilai akuntabilitas keuangan dan kinerja Dinas Perhubungan berdasarkan hasil evaluasi BPK dan BPKP.
- Sasaran keenam, dapat diukur melalui indikator :
 - a. Jumlah penumpang melalui terminal;
 - b. Rasio Ijin Trayek;
 - c. Jumlah Korban kecelakaan lalu lintas jalan dan sungai;
 - d. Jumlah fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU);
 - e. Jumlah peralatan SAR (*lifejacket, lifebuoy*, dll);
 - f. Jumlah perizinan pengiriman laut dan udara;
 - g. Jumlah biro perjalanan angkutan udara;
 - h. Jumlah rekomendasi kelaikan operasi pesawat udara.
- Sasaran ketujuh, dapat diukur melalui indikator :
 - a. Rasio panjang jalan per kendaraan;
 - b. Jumlah angkutan darat;
 - c. Jumlah angkutan sungai;
 - d. Jumlah halte;
 - e. Jumlah angkutan laut.

2.1.3. STRATEGI

Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran seperti tersebut di atas, ditempuh melalui 7 pilar strategi pembangunan transportasi Sulawesi Barat sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas di dalam pelayanan perizinan.
2. Penyusunan Rencana Kebutuhan sarana dan parasarana lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan.
3. Memperkuat kemampuan organisasi dinas dalam membangun budaya pelayanan prima.
4. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan seluruh pegawai.
5. Melakukan konsolidasi dan penyesuaian perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi baik di tingkat kelembagaan yang horizontal dan vertikal.
6. Merencanakan secara berkala kebutuhan segala upaya keselamatan dan kemananan dalam bertransportasi.
7. Meningkatkan kualitas sarana transportasi dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keadilan, kepastian hukum dan kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan (*sustainable development*).

2.1.4. KEBIJAKAN

Kebijakan Umum Dinas Perhubungan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi (2017-2022) meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan standar kualitas layanan dan standar keamanan layanan terus ditingkatkan sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
2. Mengoptimalkan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
3. Membuat publikasi pelayanan sesuai nilai atau motto instansi.
4. Mengoptimalkan sumber daya dan sumber dana yang ada untuk peningkatan SDM.
5. Memperluas jejaring dan kerja sama di bidang perencanaan dan pengkajian transportasi pada tingkat provinsi dan kabupaten.

6. Mengembangkan skema insentif yang tepat dalam penciptaan iklim inovasi untuk mendorong perkuatan struktur industri transportasi.
7. Pelibatan peran serta swasta dalam transportasi perintis.

B. RENCANA KINERJA

Komponen Perencanaan Kinerja meliputi Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Rencana Kinerja (Renja) merupakan produk dari "Perencanaan Kinerja", sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang akan dilaksanakan oleh Dinas/ Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam satu tahun. Rencana Kinerja disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang :

- 1). Sasaran tahunan beserta indikator kinerja sasaran tahunan dan target capaiannya;
- 2). Program tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan;
- 3). Kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya.

1. Sasaran Tahunan

Sasaran tahunan adalah bagian dari sasaran 5 tahun dalam Rencana yang akan diwujudkan secara bertahap pada tahun tertentu. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ditetapkan indikator kinerja sasaran yaitu ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran. Dengan target indikator kinerja dalam bentuk jumlah atau tingkat realisasi yang diinginkan pada tahun yang bersangkutan. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan 11 program yang akan dicapai dalam tahun 2019 dan mencakup 33 sasaran kegiatan. Sasaran Strategis tahun 2019 beserta indikator kinerja dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat didalam format Pengukuran Kinerja terlampir.

2. Program Tahunan

Program tahunan merupakan bagian dari program yang tercantum didalam Renstra yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, secara sistematis dan terpadu untuk mewujudkan sasaran tahunan. Bila sasaran adalah hasil yang ingin dicapai, maka program dan kegiatan merupakan aktifitas yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut.

3. Kegiatan Tahunan

Kegiatan tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program. Kegiatan didefinisikan sebagai tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran tahunan yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan. Sama halnya dengan sasaran, kegiatan juga diukur kinerjanya berdasarkan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan diperlukan agar kinerja kegiatan dapat dinilai keberhasilannya, diukur secara objektif dan akurat. Perumusan indikator kinerja kegiatan harus relevan, terkait dan dapat digunakan untuk mengukur capaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis

dengan memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan dan data pendukung yang terorganisir. Indikator kinerja tersebut harus memenuhi kriteria: spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif, relevan dengan sasaran yang ingin dicapai. Indikator kegiatan dikategorikan kedalam kelompok indikator *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil). *Input* adalah semua sumber daya yang diperlukan/ digunakan untuk melaksanakan kegiatan; yang antara lain berupa dana, peralatan, metode dan bahan/ material bahkan Sumber Daya Manusia/ SDM.

Output adalah keluaran atau produk langsung dari kegiatan yang telah dilaksanakan, misalnya suatu bangunan atau barang yang dibangun/dibeli, kali kegiatan suatu acara/aktifitas yang dilaksanakan, jumlah orang/ lembaga yang diberi penyuluhan/ bimbingan/ pembinaan. *Outcome* merupakan hasil nyata dari output atau berfungsinya output, misalnya meningkatnya pengetahuan, kesadaran, motivasi dan kualitas perilaku, atau berfungsinya bangunan atau barang yang dibeli dan sebagainya. *Benefit* adalah manfaat yang diperoleh dari adanya *outcome*, yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sedangkan *impact* adalah pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang ditimbulkan benefit.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi sasaran utama dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

- Tujuan Penggunaan Indikator Kinerja Utama

Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam penyusunan perencanaan jangka menengah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) K/L maupun SKPD, maka IKU ini akan digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut. Dalam berbagai literatur selalu disebutkan bahwa kriteria dokumen perencanaan yang baik adalah jika dokumen tersebut dapat dievaluasi sejauh mana keberhasilannya. Evaluasi keberhasilan tersebut hanya dapat dilakukan jika dalam dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan seperangkat indikator kinerja yang akan mengukur capaian pelaksanaan perencanaan.

Dalam perencanaan kinerja tahunan, maka IKU ini akan menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut yang harus diajukan usulan anggarannya dalam dokumen RKA K/L ataupun RKA - SKPD. Dengan pendekatan ini maka akan diperoleh beberapa manfaat, yaitu : Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi; Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan; Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya

pelaksanaan tugas dan fungsi.

Setelah pelaksanaan program dan kegiatan, maka dilakukan pengukuran berdasarkan IKU yang telah ditetapkan tersebut. Hasil pengukuran ini selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja instansi yang bersangkutan serta sebagai dasar pelaksanaan evaluasi kinerja untuk mewujudkan perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Pembahasan Indikator Kinerja Utama ini di tampilkan agar dapat menjadi bahan acuan dalam menetapkan dan mengukur indicator kinerja program dan kegiatan. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pada proses penetapan kinerja kegiatan tahunan.

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggungjawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah / tanggungjawab/ kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Selanjutnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat untuk tahun anggaran 2018 ditetapkan susunan Perjanjian Kinerja Tingkat SKPD sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

NO.	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Anggaran
------------	----------------	----------------------------------	---------------	-----------------

1	2	3	4	5
1	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan		
		Jumlah bangunan terminal angkutan darat		800.000.000
2	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan		
		Tersedianya studi sebagai data dukung untuk pembangunan infrastruktur transportasi laut		300.000.000
3	Program peningkatan pelayanan angkutan	Mengembangkan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman		
		Terbentuknya Posko Perayaan Hari Lebaran, Natal dan Tahun Baru		69.696.000
4	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Mengembangkan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman		
		Sosialisasi terhadap pengusaha jasa sub sektor Perhubungan laut		79.415.000
5	Program peningkatan keselamatan transportasi	Mengembangkan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman		
		Terpilihnya pelajar yang memiliki kepemimpinan (leadership), kemampuan berbicara di depan umum (public speaking), norma/etika dan materi karya tulis tentang Keselamatan Lalu Lintas bagi pelajar seSulawesi Barat		48.538.000
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya aparatur profesional yang handal		
		Jumlah SDM yang memiliki kemampuan teknis		55.000.000

NO.	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
7	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Mengendalikan kemacetan, keamanan dan keselamatan lalu lintas		
		Jumlah Fasilitas Keselamatan LLAJ berupa LPJU Solar Cell		3.652.038.650

NO.	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Anggaran
-----	---------	---------------------------	--------	----------

1	2	3	4	5
8	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	<i>Mengendalikan kemacetan, keamanan dan keselamatan lalu lintas</i>		
		Jumlah Fasilitas Keselamatan LLAJ berupa Guard rail		400.000.000
9	Program pengendalian lalu lintas	<i>Mengendalikan kemacetan, keamanan dan keselamatan lalu lintas</i>		
		Jumlah aktivitas pengendalian dan pengawasan lalu lintas		135.600.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

NO.	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Anggaran
-----	---------	---------------------------	--------	----------

1	2	3	4	5
1	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan		
		Jumlah bangunan terminal angkutan darat		800.000.000
2	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan		
		Tersedianya studi sebagai data dukung untuk pembangunan infrastruktur transportasi laut		300.000.000
3	Program peningkatan pelayanan angkutan	Mengembangkan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman		
		Terbentuknya Posko Perayaan Hari Lebaran, Natal dan Tahun Baru		69.696.000
4	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Mengembangkan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman		
		Sosialisasi terhadap pengusaha jasa sub sektor Perhubungan laut		79.415.000
5	Program peningkatan keselamatan transportasi	Mengembangkan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman		
		Terpilihnya pelajar yang memiliki kepemimpinan (leadership), kemampuan berbicara di depan umum (public speaking), norma/etika dan materi karya tulis tentang Keselamatan Lalu Lintas bagi pelajar seSulawesi Barat		48.538.000
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya aparatur profesional yang handal		
		Jumlah SDM yang memiliki kemampuan teknis		55.000.000

NO.	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
7	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Mengendalikan kemacetan, keamanan dan keselamatan lalu lintas		
		Jumlah Fasilitas Keselamatan LLAJ berupa LPJU Solar Cell		3.652.038.650

NO.	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Anggaran
-----	---------	---------------------------	--------	----------

1	2	3	4	5
8	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Mengendalikan kemacetan, keamanan dan keselamatan lalu lintas		
		Jumlah Fasilitas Keselamatan LLAJ berupa Guard rail		400.000.000
9	Program pengendalian lalu lintas	Mengendalikan kemacetan, keamanan dan keselamatan lalu lintas		
		Jumlah aktivitas pengendalian dan pengawasan lalu lintas		135.600.000

NO.	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Program peningkatan pelayanan angkutan	Meningkatnya layanan transportasi angkutan darat		
		Jumlah rapat-rapat koordinasi bidang perhubungan darat yang dilaksanakan	17 kali	17 kali
		Terbentuknya Posko Perayaan Hari Lebaran, Natal dan Tahun Baru	2 kali posko	2 kali posko
2	Program peningkatan keselamatan transportasi	Meningkatnya kepedulian terhadap keselamatan transportasi		
		Terpilainya pelajar yang memiliki kepemimpinan (leadership), kemampuan berbicara di depan umum (public speaking), norma/etika, dan materi karya tulis tentang keselamatan Lalu Lintas bagi pelajar se-Sulawesi Barat	6 kabupaten	6 kabupaten
3	Program rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas transportasi	Terpeliharanya fasilitas transportasi		
		Jumlah pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ	15 unit	4 unit
4	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Terpenuhiya fasilitas keselamatan jalan		
		Jumlah Fasilitas Keselamatan LLAJ	15 unit	0 unit
5	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terpenuhiya sarana dan prasarana perhubungan darat		
		Jumlah bangunan terminal angkutan darat	1 unit	1 unit
6	Program pengendalian lalu lintas	Frekuensi kegiatan penertiban pengendalian lalu lintas		
		Jumlah aktivitas pengendalian dan pengawasan lalu lintas	6 kegiatan	2 kegiatan

NO.	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Program peningkatan pelayanan angkutan	Koordinasi dalam Percepatan layanan transportasi angkutan kereta api		
		Jumlah rapat-rapat koordinasi bidang perhubungan perkeretaapian, sungai dan penyeberangan yang dilaksanakan	17 kali	17 kali

NO.	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Program peningkatan pelayanan angkutan	Pembinaan pengusaha jasa sub sektor Perhubungan laut		
		Sosialisasi terhadap pengusaha jasa sub sektor Perhubungan laut	16 pengusaha jasa	16 pengusah
		Jumlah rapat-rapat koordinasi bidang perhubungan laut dan udara yang dilaksanakan	17 kali	17 kali
2	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur transportasi darat		
		Tersedianya study sebagai data dukung untuk pembangunan infrastruktur transportasi laut dan udara	2 Dokumen study	2 dokumen

2. Perbandingan antara Realisasi , Capaian Kinerja Tahun ini dan Tahun Lalu serta Beberapa Tahun Terakhir

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019
1	2	3	4			7	8	9
Bidang Perhubungan Darat								
1	Peningkatan kualitas SDM di bidang transportasi darat	Jumlah SDM fungsional teknis Bidang Perhubungan Darat	Orang	26	-			
2	Meningkatnya kapasitas sarana transportasi darat	Persentase pergerakan kendaraan dan penumpang pada terminal tipe A, B dan C	%	22,38				
		Jumlah kendaraan melalui jembatan timbang di Sulawesi Barat	Unit	39.407	-	-	-	-
		Jumlah transportasi angkutan darat antar provinsi (masuk)	Unit	217.996		246.061	99.897	112.465
		Jumlah transportasi angkutan darat antar provinsi (keluar)	Unit	187.617		238.930	97.735	109.478
3	Meningkatnya fasilitas keselamatan/ keamanan transportasi	Jumlah pagar pengaman jalan	Meter	308	364	-	-	308
		Jumlah rambu-rambu jalan	Unit	31	9	-	-	-
		Jumlah LPJU	Unit	72	55	32	-	80
4	Meningkatnya keselamatan/ keamanan transportasi darat	Menurunnya jumlah kecelakaan transportasi darat	Kecelakaan	68 (data Kab. Mamuju)				
5	Penyiapan pemberian perizinan pelayanan teknis sarana transportasi angkutan darat	Jumlah angkutan penumpang yang mengurus izin trayek	Izin trayek	212			-	-

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bidang Perhubungan Laut dan Udara								
1	Meningkatnya pelayanan transportasi Udara	Meningkatnya layanan transportasi angkutan udara di Bandara Tamba Padang	Maskapai penerbangan	2	2	2	2	2
		Jumlah rute penerbangan di Bandara Tamba Padang	Rute	2	2	2	2	2
		Jumlah rute penerbangan di Bandara Sumarorong	Rute	3	2	-	-	-
2	Pembinaan kegiatan sistem operasi keselamatan dan keamanan penerbangan	Kegiatan sosialisasi sistem operasi keselamatan dan keamanan penerbangan	Orang	140	-	-	-	-
3	Meningkatnya kapasitas sarana transportasi udara	Jumlah pesawat yang berangkat	Unit	717	1.152			
		Jumlah pesawat yang datang	Unit	717	1.152			
		Jumlah penumpang yang berangkat	Jiwa	31,403	74.364	92.117		
		Jumlah penumpang yang datang	Jiwa	28,532	68.400	78.787		
		Jumlah bagasi muat	Kg	136,995	306.516	348.707		
		Jumlah bagasi bongkar	Kg	155,457	437.100	462.240		
4	Meningkatnya fasilitas penunjang sarana dan prasarana transportasi udara	Tersedianya fasilitas penunjang sarana dan prasarana bandar udara	Ruas jalan akses bandara sumarorong	4 km jalan	-	-	-	-

5	Meningkatnya layanan transportasi laut melalui pelabuhan	Aktivitas pelayaran nasional di pelabuhan Sulawesi Barat	Pelayaran	86				
		Aktivitas pelayaran umum di pelabuhan Sulawesi Barat	Pelayaran	39				
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha jasa sub sektor Perhubungan laut	Sosialisasi terhadap pengusaha jasa sub sektor Perhubungan laut	Pengusaha Jasa	6	6			
7	Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional keselamatan pelayaran	Sosialisasi kegiatan operasional keselamatan pelayaran	Orang	60	60			
8	Meningkatnya kapasitas sarana transportasi laut melalui pelabuhan	Jumlah penumpang yang berangkat melalui pelabuhan	Jiwa	33,126	30.239	34.053		
		Jumlah penumpang yang datang melalui pelabuhan	Jiwa	31.807	27.390	26.434		
		Jumlah barang muat yang melalui pelabuhan	Ton	314.069	1.374.346	1.505.764		
		Jumlah barang bongkar yang melalui pelabuhan	Ton	137.902	594.190	524.762		

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bidang Perkeretaapian								
1	Meningkatnya layanan transportasi laut melalui pelabuhan	Aktivitas pelayaran nasional di pelabuhan Sulawesi Barat	Pelayaran	86	-	-		

	Aktivitas pelayaran umum di pelabuhan Sulawesi Barat	Pelayaran	39	-	-		
--	--	-----------	----	---	---	--	--

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Rencana Strategis

Berdasarkan tabel 9.3 RPJMD pada penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bahwa ada beberapa indikator kinerja yang tidak kami tampilkan laporannya, karena kewenangannya tidak sampai ke target kinerja tersebut. Sehingga dalam laporan ini kami sampaikan tabel-tabel kinerja sebagai berikut:

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017		REALISASI 2019	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
7	Perhubungan				
7.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	4,897,652			
	- Jumlah Penumpang Angkutan Darat	4,897,652	Masuk	595.879	22,38%
			Keluar	603.279	

Berdasarkan tabel di atas, maka capaian kinerja atas indikator arus penumpang angkutan umum adalah Jumlah penumpang angkutan darat yang masuk = 595.879. yang keluar = 603.279. dengan persentase capaian 22,38%. Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian target tersebut di atas adalah dengan melaksanakan beberapa program utama, yaitu :

1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Dengan dukungan kegiatan :

1. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
2. Pembinaan Pengusaha Jasa Transportasi Laut
3. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Unit Pelaksana Teknis Perhubungan Wil.

III

4. Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Pengembangan Transportasi, Kebandarudaraan dan Perkeretaapian
- Rapat Koordinasi Bidang Perhubungan KASP
5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Unit Pelaksana Teknis Perhubungan Wil.

II

6. Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Pelayanan



7. Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
8. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Unit Pelaksana Teknis Perhubungan Wil.

I

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD hasil output masing-masing 100% dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pendanaan	Biaya
1	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	APBD	69.696.000.
2	Pembinaan Pengusaha Jasa Transportasi Laut	APBD	79.415.000.
3	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Unit Pelaksana Teknis Perhubungan Wil. III	APBD	35.833.000.
4	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Pengembangan Transportasi, Kebandarudaraan dan Perkeretaapian	APBD	75.000.000.
5	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Unit Pelaksana Teknis Perhubungan Wil. II	APBD	24.000.000.
6	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Pelayanan	APBD	79.725.000.
7	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	APBD	62.960.000.
8	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Unit Pelaksana Teknis Perhubungan Wil. I	APBD	75.000.000.

2. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Dengan dukungan kegiatan :

1. Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Output dari kegiatan ini adalah berupa Penyusunan Studi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Mamuju. Studi tersebut merupakan data dukung yang harus disediakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Mamuju. Pelaksanaan program dan kegiatan di atas dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD hasil dengan realisasi 100%.

No	Kegiatan	Pendanaan	Biaya
1	Penyusunan Studi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Mamuju	APBD	300.000.000.

3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Dengan dukungan kegiatan :

1. Pembangunan Terminal Tipe B Mamuju Tengah

Output dari kegiatan ini adalah berupa perampungan pematangan lahan yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Terminal ini dibangun secara bertahap, menyesuaikan anggaran yang tersedia. Pelaksanaan program dan kegiatan di atas dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD hasil dengan realisasi 100%

No	Kegiatan	Pendanaan	Biaya
1	Pembangunan Terminal Tipe B Mamuju Tengah	APBD	794.260.000.

4. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Dengan dukungan kegiatan :

1. Pengadaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas

Rencana output dari kegiatan ini adalah berupa lampu penerangan jalan umum (LPJU) tenaga surya yang akan dihibahkan ke Polda Sulbar dan Korem 142 Tatag, LPJU di Ruas Jalan Lampa-Matangnga dan Guard Rail. Hasil output 100% dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pendanaan	Biaya
1	Pengadaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	APBD	3.533.762.950.
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	APBD	400.000.000.

5. Program Peningkatan Keselamatan Transportasi

Dengan dukungan kegiatan :

1. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas

Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dilaksanakan dengan cara melakukan seleksi dari pelajar tingkat SLTA di enam kabupaten se-Sulbar. Pelajar yang terpilih dari enam kabupaten tersebut akan dibawa ke Jakarta untuk mengikuti Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas tingkat nasional.

No	Kegiatan	Pendanaan	Biaya
1	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	APBD	48.538.000.

6. Program Pengendalian Lalu Lintas

Dengan dukungan kegiatan :

1. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Kendaraan di Jalan Raya

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melakukan pengendalian disiplin bagi pengendara kendaraan roda empat atau lebih. Pelaksanaan program dan kegiatan di atas dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD hasil output 100% dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pendanaan	Biaya
1	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan di jalan raya	APBD	115.202.352,55

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan ataupun Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

a) Bidang Perhubungan Darat

Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target kinerja di Bidang Perhubungan Darat, yaitu :

1. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
2. Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Pengembangan Transportasi, Kebandarudaraan dan PerkeretaapianRapat Koordinasi Bidang Perhubungan KASP
3. Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. Pembangunan Terminal Tipe B Mamuju Tengah
5. Pengadaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas
6. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan
7. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas
8. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan di jalan raya

Target kinerja Bidang Perhubungan Darat dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan berhasil dicapai dengan realisasi 100%. Dari sudut pandang peningkatan pencapaian indikator secara maksimal dibidang perhubungan darat belum terpenuhi, hal ini tidak terlepas dari pengaruh belum maksimalnya juga alokasi anggaran terhadap bidang perhubungan darat,

sehingga solusi yang diberikan terhadap situasi anggaran yang minim, adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin/wajib dan mendesak dulu.

b. Bidang Perhubungan Laut

Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target kinerja di Bidang Perhubungan Laut yaitu :

1. Penyusunan Studi Pembangunan Pelabuhan penyeberangan Mamuju Pembinaan Pengusaha Jasa Transportasi Laut
2. Rapat Koordinasi Bidang Pelayaran

Target kinerja Bidang Perhubungan Darat dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan berhasil dicapai dengan realisasi 100%.

c. Bidang Perkeretaapian ASP

Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target kinerja di Perhubungan Pengembangan Transportasi, Kebandarudaraan dan Perkeretaapian, yaitu :

1. Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Pengembangan Transportasi, Kebandarudaraan dan Perkeretaapian

Target kinerja Bidang Perhubungan Pengembangan Transportasi, Kebandarudaraan dan Perkeretaapian sepenuhnya berhasil dilaksanakan.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan dengan seefisien mungkin, hal ini dapat dilihat dari gambaran realisasi anggaran tahun 2018.

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a) Bidang Perhubungan Darat

- Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

- Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Pengembangan Transportasi, Kebandarudaraan dan Perkeretaapian
- Rapat Koordinasi Bidang Perhubungan KASP
- Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Pembangunan Terminal Tipe B Mamuju Tengah
- Pengadaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas
- Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan
- Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas
- Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan di jalan raya

a) Bidang Pelayaran

- Penyusunan Studi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Mamuju Pembinaan Pengusaha Jasa Transportasi Laut
- Rapat Koordinasi Bidang Pelayaran

a) Bidang Perhubungan Pengembangan Transportasi, Kebandarudaraan dan Perkeretaapian Udara

- Rapat Koordinasi Bidang Perhubungan Pengembangan Transportasi, Kebandarudaraan dan Perkeretaapian

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi APBD Tahun 2019 Dinas Perhubungan Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

- **Belanja Tidak Langsung, Pagu anggaran = 5.750.802.766,00** (Lima milyar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah). **Realisasi Belanja Tidak Langsung = 5.705.816.797,00** (Lima milyar tujuh ratus lima juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) **(99,22 %)**
- **Belanja Langsung, Pagu anggaran = 12.973.984.269,55,00-** (dua belas milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan koma lima lima rupiah). **Realisasi Belanja Langsung = 12.853.353.321,35,00-** (dua belas milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu koma tiga lima rupiah) dan secara persentase realisasi adalah 99,07%.



BAB IV PENUTUP

Demikian kami paparkan dalam LKjIP ini sebagai Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018.

A. Kesimpulan

Kegiatan fisik dan nonfisik yang tertuang dalam Rencana Kinerja secara umum telah terlaksana dengan baik dan lancar mencapai hasil realisasi persentase fisik 100 % dan realisasi persentase keuangan 99,07 %.

Dari segi jumlah anggaran yang tersedia untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 12.973.984.269,55,00 realisasi keuangan Rp12.853.353.321,35,00- (99,07%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 120.630.948,20- dan Belanja Tidak Langsung Rp. 5.750.802.766,00- realisasi keuangan Rp.5.705.816.797,00 (99,22%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 44.985.969.

B. Saran

Bahwa guna mendukung fungsi dan peran Dinas Perhubungan untuk berkiprah dalam kegiatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat, agar lebih berfungsi secara maksimal sebagai Lembaga Daerah yang Otonom serta kiprah dan citranya lebih berkembang, maka untuk tahun-tahun berikutnya kiranya anggaran yang dikelola dapat ditingkatkan.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan

Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 ini disampaikan, sebagai bahan masukan dan pertimbangan pada tingkat atasan. Kami menyadari masih ada kekurangan dalam laporan ini, untuk itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas LKjIP pada tahun-tahun berikutnya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan di masa yang akan datang.